

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan daerahnya masing-masing. Terkait dengan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah tersebut juga perlu bekerja keras, agar dalam setiap pembiayaan pembangunan, daerah tersebut dapat mandiri dari sisi pembiayaan. Kemandirian tersebut dapat dicapai apabila daerah tersebut dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dan juga pengelolaan aset daerah dengan baik. (Frisca Wulandari, 2016)

Aset daerah atau barang milik daerah adalah bentuk dari kekayaan suatu daerah, kekayaan suatu daerah ini terdiri atas barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak, kekayaan yang dimiliki daerah ini, berada dalam kuasa Pemerintah Daerah, pelaksanaan pemanfaatan kekayaan daerah ini akan dibiayai oleh dana anggaran dan belanja daerah (Evi Noviawati, 2016). Melalui proses pengelolaan aset yang baik diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, maupun

masyarakat sebagai mata pencaharian, sekaligus menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan peran dan fungsi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik kepada publik (Frisca Wulandari, 2016). Kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan salah satu jenis aset yang diklasifikasikan sebagai barang milik daerah. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dapat digunakan untuk mobilisasi kegiatan operasional (Elfitri Santi, 2020).

Kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dapat digunakan oleh beberapa pemegang jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti kepala badan, dinas atau bagian untuk menopang pelaksanaan pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal (Lia Daniati, 2013).

Dalam ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah, terdapat satu tahapan yaitu, penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah ini merupakan suatu kegiatan yang berada dalam kuasa dari pengguna/kuasa pengguna berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan dari barang milik daerah yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari satuan kerja yang bersangkutan (Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2013). Berdasarkan definisi tersebut, dijelaskan lebih lanjut mengenai penatausahaan yang merupakan suatu proses inventarisasi, yang dituangkan dalam bentuk suatu pembukuan dan laporan atas barang milik daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya penatausahaan ini agar satuan kerja yang berwenang dapat memperoleh kepastian dari sisi jumlah barang, kondisi barang, dan juga nilai dari barang milik daerah yang

ada dalam kuasanya (M Yusuf, 2013). Dalam penggunaan barang milik daerah ini, terdapat beberapa klasifikasi terkait dengan kelompok barang yaitu, tanah, bangunan dan juga gedung, mesin dan peralatan, Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ), konstruksi yang masih dalam tahap pengerjaan dan aset lainnya (M Yusuf, 2010).

Namun, seringkali ditemukan penatausahaan yang belum optimal baik dari pembukuan, inventaris yang meliputi pencatatan dan pelaporan dokumen terkait kendaraan dinas. Terjadinya hal ini dikarenakan prosedur pengadaan kendaraan hingga pencatatan oleh Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan tidak diterapkan secara maksimal (Lia Daniati, 2013). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat terkait dengan pelaksanaan penatausahaan barang, perlu dioptimalkan agar tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dapat memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas (Dewi Refica, 2018). Sebagai kota yang baru memiliki kewenangan sebagai daerah otonom sejak tahun 2001, Pemerintah Kota Cimahi dihadapkan dengan banyaknya penatausahaan aset setelah memisahkan diri dari Kabupaten Bandung (Tim Redaksi JabarEkspres.com, 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Cimahi. Penulis akan menuangkan hasil evaluasi tersebut ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “EVALUASI ATAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), berikut ini adalah beberapa permasalahan yang ditentukan oleh penulis :

1. Bagaimana klasifikasi jenis kendaraan dinas di Pemerintah Kota Cimahi?
2. Bagaimana proses penggunaan dan kesesuaian penerapan aturan dalam penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas oleh Pemerintah Kota Cimahi?
3. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam praktik penggunaan barang milik daerah?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengevaluasi klasifikasi jenis kendaraan dinas di Pemerintah Kota Cimahi.
2. Mengevaluasi proses penggunaan dan kesesuaian penerapan aturan dalam penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas oleh Pemerintah Kota Cimahi.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam praktik penggunaan barang milik daerah.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam karya tulis ini, penulis berfokus pada klasifikasi jenis kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dan proses penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi. Selain itu, penulis juga akan akan membandingkan antara teori dan praktik dalam klasifikasi kendaraan dinas, penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan

dinas di Pemerintah Kota Cimahi, dan juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam proses penggunaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas. Data yang diperoleh berasal dari BPKAD Pemerintah Kota Cimahi.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ditujukan untuk mengevaluasi klasifikasi jenis kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, proses penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas di Pemerintah Kota Cimahi untuk kemudian membandingkan antara teori dan praktik di lapangan dalam klasifikasi kendaraan dinas, proses penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas, dan juga mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam proses penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas tersebut.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai uraian latar belakang penulis dalam pemilihan judul, penulisan rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika dalam penyajian Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan membahas mengenai teori di bidang pengelolaan barang daerah khususnya untuk penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas. Teori

tersebut akan menjadi landasan untuk melakukan evaluasi atas praktik pengelolaan yang berlaku di Pemerintah Kota Cimahi.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab ini, penulis akan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulisan akan menjelaskan informasi mengenai objek penulisan berupa profil pemerintah Kota Cimahi. Pada bagian pembahasan hasil, penulis akan menjelaskan mengenai klasifikasi kendaraan dinas, proses penggunaan barang milik daerah, tinjauan perbandingan antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dan juga permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam menerapkan aturan pengelolaan barang milik daerah.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan-simpulan atas penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan penulis di bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak lain berhubungan dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini.